



RENCANA STRATEGIG (RENSTRA) 2021-2026

(PEMUTAKHIRAN KEPMEN 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR**
JL.DR.MUWARDI NO.395 CIANJUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (Lima) tahun. Renstra PD, memuat *tujuan, kebijakan, sasaran, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*.

Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis PD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada setiap tahunnya yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021– 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu

Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2021– 2026 yaitu **“Cianjur Manjur (Mandiri,Maju,Religius) dan Berakhlak Mulia”** dengan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertaqwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0.;
- 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan era industri 4.0.;
- 3) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
- 4) Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
- 5) Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Dari ke 5 (Lima) misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah pada misi ke 3 (Tiga).

Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan salah satu program strategis, sasaran dan indikator RPJMD yang berkaitan dengan misi ke 3 (Tiga) yaitu program infrastruktur, dengan sasaran RPJMD meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan dengan indikator sasaran persentase panjang jalan kabupaten antar pusat pertumbuhan dalam kondisi baik.

Sasaran dan program strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
22. Berita Acara Verifikasi dan Validasi atas Pemutakhirana Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/294/AA.05/2023 27 November Hal; Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2021– 2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Isu isu strategis Tugas dan Fungsi PD;
2. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
3. Rencana Program, Kegiatan, dan sub. Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2021 - 2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja / Tapkin Tahunan dan Rencana Anggaran;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, dan penentuan isu isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan dinas.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pemerintah daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang yang telah

ditetapkan dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a) Kepala
- b) Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Lalu Lintas membawahkan :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Perlengkapan Jalan.
 - 3) Seksi Pengendalian Operasional (JF Analisis Kebijakan)
- d) Bidang Angkutan membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Orang;
 - 2) Seksi Angkutan Khusus dan Barang.
- e) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan membawahkan :
 - 1) Seksi Teknik Sarana;
 - 2) Seksi Teknik Keselamatan.
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - 1) UPTD Terminal Angkutan Umum Pasirhayam;
 - 2) UPTD Terminal Angkutan Umum Rawabango;
 - 3) UPTD Terminal Angkutan Umum Cipanas;
 - 4) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional : Penguji Kendaraan Bermotor dan Fungsional Analisis Kebijakan.

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- c) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalulintas, pengendalian operasional lalulintas serta keselamatan dan ketertiban

- lalu lintas;
- d) Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang;
 - e) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan;

Tata Laksana Dinas Perhubungan

1 Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2 Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;

- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Prosedur Kerja Dinas:

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas membantu

Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala dalam menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, dan perlengkapan jalan.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Perlengkapan Jalan

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan bertanggungjawab membantu Kepala dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Angkutan Orang

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan orang.

Seksi Angkutan Khusus dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan khusus dan barang.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan bertanggungjawab membantu Kepala dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan.

Seksi Teknik Sarana

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis sarana.

Seksi Teknik Keselamatan

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknik keselamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional, yaitu pengujian kendaraan bermotor dan analisis kebijakan.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 23 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b= 1 jabatan, Eselon III/a= 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 14 jabatan, dan Eselon IV/b =4 jabatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2021 seluruhnya sebanyak 67 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 25,64% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 67,09% merupakan tenaga sukarela sebagaimana disajikan pada tabel tabel berikut.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	TKS	Jumlah	%
1	Strata 2	8	1	9	3.47
2	Strata 1 / Diploma IV	34	35	69	26.64
3	Sarjana Muda / Diploma 3	4	1	5	1.93
4	Diploma 2	9	0	9	3.47
5	SLTA / Sederajat	5	147	152	58.69
6	SLTP / Sederajat	1	8	9	3.47
7	SD	0	6	6	2.32
Jumlah		61	198	259	100

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2023

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil	59	22,78
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2	0,77
2	Tenaga Kerja Sukarela	198	76,44
Jumlah		259	100

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan Tahun 2021

No.	Kepangkatan/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	IV/c	1	1,69
2	IV/b	1	1,69
3	IV/a	2	3,39
4	III/d	15	25,42
5	III/c	6	10,17
6	III/b	5	8,47
7	III/a	14	23,73
8	II/d	0	0
9	II/c	14	23,73
10	II/b	1	1,69
11	II/a	0	0
Jumlah		59	100

No	Golongan Ruang PPPK	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	6	2	100
2	7	0	0
3	9	0	0
Jumlah		2	100

2.2.1 Asset / Modal

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Asset Dinas Tahun 2023

	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2023
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	7,656,000.00	17,924,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Retribusi	256,231,401.88	256,381,401.88
Penyisihan Piutang	- 185,938,059.36	- 256,232,151.88

Beban Dibayar dimuka	139,895,947.43	9,967,141.29
Persediaan	1,296,649,262.50	1,343,238,317.56
Jumlah Aset Lancar	1,514,494,552.45	1,371,278,708.85
ASET TETAP		
Tanah	16,054,600,000.00	16,054,600,000.00
Peralatan dan Mesin	26,583,478,018.87	33,198,187,338.87
Gedung dan Bangunan	11,512,459,914.00	11,512,459,914.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	35,399,871,235.00	126,468,444,521.67
Aset Tetap Lainnya	2,322,000.00	2,322,000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	278,307,750.00	178,935,000.00
Akumulasi Penyusutan	- 23,827,285,216.69	- 28,900,573,456.05
Jumlah Aset Tetap	66,003,753,701.18	158,514,375,318.49
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	2,908,234,083.00	2,908,234,083.00
Aset Lain-lain	1,906,531,450.00	1,916,281,450.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 1,311,961,342.00	- 1,311,961,342.00
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	- 1,234,120,637.00	- 1,243,870,637.00
Jumlah Aset Lainnya	2,268,683,554.00	2,268,683,554.00
Jumlah Total Aset	69,786,931,807.63	162,154,337,581.34

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020 Kabupaten Cianjur																				
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi (Tahun)	Ratio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan		IKU	-	56,80%	68,60%	74,14%	82,07%	100%	-	39,04%	46,21%	70,92%	80,98%	100%	-	68,73%	67,36%	95,66%	98,67%
2	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur		IKU	-	95%	96%	97%	100%	100%	-	94,59%	100,74%	93,41%	77,14%	100%	-	99,57%	104,94%	96,30%	77,14%
3	Persentase perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan		IKU	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Pada capaian tahun 2016 belum ada target dikarenakan masih mengacu pada Renstra sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2 indikator tidak tercapai yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sebesar 39,04% dan persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten cianjur sebesar 94,59%. Pada indikator pertama tidak tercapai dikarenakan belum adanya akses jalan pada pembangunan terminal sehingga

kegiatan pembangunan terminal tidak tercapai. Sedangkan pada indikator kedua tidak tercapai karena berkurangnya PKB keliling yang menjangkau Cianjur selatan.

Pada tahun 2018 hanya 1 indikator yang tidak tercapai yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, hal ini dikarenakan belum adanya kepastian lahan untuk pembangunan terminal di Sukanagara. Pada tahun 2020 capaian pada indikator ke 1 yaitu sebesar 80,98%.

Hal yang harus diantisipasi pada tahun berikutnya yaitu kepastian lahan dan dokumen teknis yang akan digunakan untuk pembangunan terminal dikarenakan tidak tercapainya target pada tahun sebelumnya.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Pendapatan Retribusi

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 2 jenis retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
 - a) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha.
 - a) Retribusi terminal;
 - b) Retribusi tempat parkir khusus.

Pencapaian nilai pendapatan daerah pada tahun (2017 s/d 2020) mengalami kecenderungan kenaikan nilai raihan pendapatan dari retribusi. Pencapaian tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 93,96% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan target maupun capaian terkait pandemi covid-19.

Secara rinci target realisasi pendapatan retribusi daerah disajikan pada



Gambar 2.3.2.1

Gambar 2.3.2.2



b. Penganggaran

Selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, rata rata pencapaian realisasi belanja anggaran pertahun adalah 93,68%.

Secara rinci pertumbuhan penganggaran selama lima tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan, sebagaimana disajikan disajikan dalam **Tabel 2.6** dan **Gambar 2.3.2.3**

Gambar 2.3.2.3



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Tabel 2.6																
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan																
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur																
No.	Urusan /BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke-(Rp)					Realisasi Anggaran Tahun ke-(Rp)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Urusan Wajah Bukan Pelayanan Dasar															
1.1	PERHUBUNGAN															
A.	Peningkatan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	-	2.016.578	1.085.061	1.249.000	1.249.060	-	2.006.409	1.052.281	1.240.127	1.246.418	-	99,50	96,98	99,29	99,79
1)	Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-	878.055	690.320	790.000	197.277	-	874.286	682.533	782.698	194.875	-	99,57	98,87	99,08	98,78
2)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran	-	337.560	151.049	234.000	136.226	-	336.010	126.549	232.429	136.206	-	99,54	83,78	99,33	99,99
3)	Pengelolaan Angkutan	-	297.668	243.693	175.000	137.757	-	297.508	243.200	175.000	137.757	-	99,95	99,80	100,00	100,00
4)	Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	503.295	-	-	-	-	498.605	-	-	-	-	99,07	-	-	-

5)	Aksi Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	50.000	40.000	-	-	-	50.000	40.000	-	-	-	100,00	100,00
6)	Pengendalian Operasional	-	-	-	-	737.800	-	-	-	-	737.580	-	-	-	-	99,97
7)	Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	1.002.578	1.302.888	1.193.750	1.072.154	-	993.369	1.298.049	962.867	1.037.384	-	99,08	99,63	80,66	96,76
8)	Pengelolaan pengujian dan pengadaan barang kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	-	928.298	1.302.888	1.193.750	1.072.154	-	919.884	1.298.049	962.826	1.037.383	-	99,09	99,63	80,66	96,76
9)	Pengadaan Alat Uji	-	74.280	-	-	-	-	73.485	-	-	-	-	98,93	-	-	-
B.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	4.340.188	5.552.309	7.013.470	3.590.769	-	3.303.371	4.968.651	6.760.467	3.557.186	-	76,11	89,49	96,39	99,06
1)	Pembangunan Terminal Tipe C	-	-	1.394.259	2.092.280	40.000	-	-	867.906	2.006.026	39.512	-	-	62,25	95,88	98,78
2)	Pengelolaan dan Pemeliharaan terminal tipe C	-	827.445	-	-	103.473	-	819.595	-	-	1.003.200	-	99,05	-	-	969,53
3)	Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan	-	1.561.466	4.158.050	861.600	325.000	-	567.632	4.100.746	851.863	322.958	-	36,35	98,62	98,87	99,37
4)	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	-	1.951.277	-	-	125.000	-	1.916.144	-	-	123.764	-	98,20	-	-	99,01
5)	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan (PJU)	-	-	-	3.859.590	-	-	-	-	3.706.028	-	-	-	-	96,02	-
6)	Pemeliharaan Shelter Halte	-	-	-	200.000	-	-	-	-	196.549	-	-	-	-	98,27	-

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Percepatan pembangunan prasarana wilayah dengan lebih meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga pengelola serta para pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur wilayah serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan prasarana wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Cianjur yang produktif dan memiliki daya saing serta mempertahankan kemantapan sarana dan prasarana yang telah ada. Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya prasarana transportasi jalan, meningkatnya kondisi kemantapan jaringan jalan, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, dan meningkatnya ketersediaan air bersih serta sanitasi lingkungan.

Jaringan jalan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi dari pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan menuju Pusat Kegiatan Wilayah (promosi) Cianjur maupun Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan Sukanagara dan PKL Perkotaan Sindangbarang makin mantap. Pengembangan prasarana transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas kemantapan prasarana jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer melalui pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan kondisi jaringan jalan yang sudah ada. Sasaran di atas dicapai juga dengan cara melanjutkan pembangunan prasarana jalan strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, meliputi dukungan terhadap penyiapan pengembangan jalan bebas hambatan Bandung-Cianjur-Sukabumi-Ciawi, penyiapan pembangunan jalan arteri primer meliputi jaringan jalan horizontal Cianjur selatan dan melanjutkan pembangunan jalan lingkaran perkotaan Cianjur yang telah dimulai pada tahap sebelumnya, keberlanjutan pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan wilayah Cianjur utara, tengah dan selatan, pembangunan jalan kolektor

primer yang menghubungkan dengan kabupaten perbatasan, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan, pengembangan jaringan jalan strategis kabupaten, pengembangan terminal pada pusat kegiatan, pembangunan terminal barang untuk menunjang kegiatan agribisnis, dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan danau pada Waduk Cirata.

Pada tahap ini dilanjutkan diimplementasikan konsep multi years project, sebagai konsep pendanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam tahun jamak, serta menjalin kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana strategis. Untuk mendukung sistem transportasi, pengembangan sistem terminal diarahkan untuk memantapkan kinerja terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, serta diarahkan pada upaya melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Cipanas, Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang, Campakamulya, Takokak, Pagelaran, Leles, Agrabinta, Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cidaun; dan pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun, dan Kecamatan Pacet. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat lainnya dilakukan dengan melanjutkan revitalisasi fungsi jaringan jalan kereta api pada jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi, sementara perwujudan sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan cara melanjutkan pengembangan pelabuhan khusus pariwisata di Kecamatan Cidaun, dan perwujudan sistem jaringan transportasi udara melalui pengembangan Bandar udara perintis di Kecamatan Cidaun.

Telaahan Isu RTRW Kabupaten Cianjur Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur periode 2021-2026 memperhatikan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Wilayah perencanaan RTRW terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) desa.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas:

1. Perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah;
3. Pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;
4. Pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang;
5. Perwujudan kawasan lindung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan budi daya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah;
6. Perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Penetapan sistem perkotaan dalam Rencana struktur ruang wilayah, sebagai berikut:

1. PKW promosi berupa PKW promosi Perkotaan Cianjur, memiliki fungsi

utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.

2. PKL, meliputi : Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur BAB 4 – Permasalahan dan Isu Strategis Daerah (Ranwal RPJMD 2021-2026)

a. PKL perkotaan Cianjur memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat;

b. PKL perkotaan Sindangbarang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan;

c. PKL perdesaan Sukanagara memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah dan pertambangan.

3. PKL promosi berupa PKL promosi perkotaan Cipanas, memiliki fungsi utama sebagai pengolahan hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah.

4. PPK memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota, terdiri atas:

a. Wilayah Utara meliputi; PPK Pacet, PPK Ciranjang, dan PPK Warungkondang;

b. Wilayah Tengah meliputi; PPK Pagelaran;

c. Wilayah Selatan meliputi; PPK Cidaun.

Sedangkan penetapan sistem perdesaan dalam Rencana struktur ruang wilayah, sebagai berikut: 1. Sistem perdesaan merupakan PPL yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa.

2. PPL meliputi: a. Wilayah utara meliputi; PPL Cikalongkulon, dan PPL Bojongpicung;

b. Wilayah tengah meliputi; PPL Takokak, dan PPL Campakamulya;

- c. Wilayah selatan meliputi; PPL Cibinong, PPL Naringgul, dan PPL Agrabinta.

Informasi lainnya mengenai struktur dan pola ruang serta indikasi rencana pemanfaatan ruang disajikan selengkapnya di Perda RTRW Kabupaten Cianjur dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas untuk lima tahun ke depan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, antara lain dari perwujudan sistem kota kota di wilayah Kabupaten Cianjur yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan yaitu pembangunan terminal penumpang atau terminal barang pada pusat pusat kegiatan / perkotaan. Disamping itu dengan adanya rencana perwujudan sistem jaringan primer jalan raya TOL Sukabumi – Ciranjang – Padalarang, dan perwujudan jaringan primer Cianjur utara – selatan, serta pembangunan lingkaran timur perkotaan Cianjur, juga memberikan peluang dan tantangan pada pelayanan dinas lima tahun kedepan seperti, penyiapan sarana / perlengkapan lalu lintas, dan tantangan mengenai pengkajian potensi dan permasalahan dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas dimasa yang akan datang. Secara rinci hasil telaahan Rencana Tata Ruang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Cianjur • PKL Sindangbarang • PKL Sukanagara • PKL Cipanas 	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Cianjur • PPK Cipanas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pusat koleksi distribusi barang • Penetapan Pusat jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal barang/ bongkar muat • Terminal penumpang type C 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Tipe C Sukanagara • Terminal Tipe C Sindang barang • Terminal Tipe C Cibeber

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPK Pacet, Ciranjang, Warungkondang, Pagelaran, Cidaun 		pariwisata, pengolahan pertanian.	- <i>Parking of street</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Tipe C Cidaun • Terminal Tipe C Cikalong
2	Jaringan jalan Primer TOL Sukabumi – Ciranjang - Padalarang	Jaringan Jalan Primer TOL Sukabumi – Ciranjang – Padalarang	Pembangunan jalan RAMP	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pola Pergerakan • Perlengkapan lalulintas 	Dua titik Pintu masuk Tol (Warungkondang dan Ciranjang)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan Primer Lingkar Timur (<i>outer ring road</i>) Kota Cianjur • Jaringan jalan Primer Cianjur Utara - Selatan • Jaringan transportasi penyebrangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan primer dan lokal • Jaringan sungai/danau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan • Pembangunan pelabuhan darat (<i>dry port</i>) Cirata • Pembangunan pelabuhan khusus pariwisata Pantai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan lalulintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Cianjur • Waduk Cirata • Pantai Kecamatan Cidaun

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pantai Kecamatan Cidaun				

Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Budidaya Peruntukan Industri • Kawasan Budidaya Peruntukan Pariwisata budaya 	<p>Kawasan Budidaya Peruntukan Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan hunian dan infrastruktur wilayah • Pembangunan kawasan industri besar dan sedang • Pembangunan penunjang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Implikasi sistem kegiatan dan sistem lalu lintas terhadap sistem operasional lalu lintas • Pengkajian pola lalu lintas dan sediaan angkutan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Cianjur • Kawasan PPK Ciranjang, Pacet, Warungkondng

				<ul style="list-style-type: none"> • Terminal angkutan wisata dan tempat parkir 	
2	Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana kawasan dan fasilitas ekonomi empat kawasan strategis • Penataan kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat Bagian Selatan 	Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas	<p>4 (Empat) Kawasan strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis ekonomi 2. Kawasan Strategis Sosial budaya 3. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup 4. Kawasan Strategis IPTEK

**Tabel 2.10 Rekapitulasi Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Lima Tahun yang Akan Datang**

Tugas Pokok	Peluang dan Tantangan Pengembangan		
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan
Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan Berdasarkan azas otonomi dan tugas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima	Peningkatan Kapasitas Pegawai/SDM menjadi Kualifikasi Teknis di	Pengerahan ikut serta diklat teknis di Tingkat Propinsi dan atau Tingkat pusat

pembantuan.	dibidang perhubungan	bidang transportasi	
<p>Fungsi</p> <p>1. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraa n sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem perencanaan dan pengendalian transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen rancangan teknis terminal (DED): • Pengkajian pengembangan angkutan berbasis energy alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen bahan regulasi koversi BBM dan Gasifikasi
<p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan bidang transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan lokasi terminal • Penambahan lokasi revitalisasi bangunan terminal • Pembangunan prasarana dan sarana <i>Road Traffic and Transport Management Centre</i> (RTTMC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan terminal cidaun, sub terminal di Jangari • Pembebasan tanah untuk terminal Di Jangari • Revitalisasi bangunan terminal, Cipanas dan Ciranjang - Pembangunan Gedung Kantor

			Dinas perhubungan yang baru
--	--	--	-----------------------------

<p>3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan usaha angkutan • Peningkatan pembinaan layanan angkutan pengguna jalan • Peningkatan pembinaan keselamatan pengguna jalan • Regulasi dan perijinan transportasi 	<p>Sepuluh (10) kali per tahun operasional terpadu penertiban angkutan</p> <p>Lima (5) kali per tahun rencana aksi tertib lalulintas</p> <p>Lima (5) kali per tahun rencana aksi tertib perparkiran</p> <p>Lima (5) kali per tahun rencana aksi tertib pengusaha angkutan umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan aksi tertib lalu lintas di perkotaan Cianjur, Cipanas, dan Ciranjang • Lomba tertib penyelenggaraan parkir • Sosialisasi Tertib Usaha Angkutan Umum • Studi pengembangan angkutan di perkotaan • Pengembangan inovasi sistem transportasi
---	--	--	---

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Cianjur. Penentuan isu strategis merupakan hasil telaahan terhadap berbagai hal, antara lain:

1. Permasalahan pembangunan Cianjur;
2. Isu strategis nasional dan regional (provinsi) yang mempengaruhi Kabupaten Cianjur;
3. Isu strategis dari daerah sekitarnya yang mempengaruhi Kabupaten Cianjur;
4. Isu strategis dalam dokumen :
 - a. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - b. RPJPD Kabupaten Cianjur
 - c. RTRW Kabupaten Cianjur.
 - d. Hasil KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur 2021-2026.

Telaahan Isu Nasional Sustainable Development Goals (SDG's) Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini.

Ke 17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan

- seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; – Permasalahan dan Isu Strategis Daerah (Ranwal RPJMD 2021-2026);
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang melanda dunia serta Indonesia khususnya telah berdampak. Dampak dari pandemi COVID-19 tidak terbatas kepada permasalahan kesehatan namun menimbulkan permasalahan lain terutama ekonomi dan sosial. Tidak hanya dalam skala

nasional, dampak COVID-19 sangat dirasakan pula oleh daerah dan dapat mengganggu jalannya pembangunan daerah. Demikian pula di Kabupaten Cianjur, Dampak COVID telah dirasakan seiring munculnya kasus COVID-19. Bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan masalah kesehatan ekonomi dan sosial, apalagi posisi Kabupaten Cianjur berada di perlintasan kota besar Jakarta dan Bandung sehingga rawan penyebaran COVID-19. Berbagai pembatasan yang dilakukan Pemerintah seperti PSBB dan PPKM terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus pada tahun 2021. Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan ke Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi Kabupaten Cianjur dan Tujuan serta Sasaran rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan pelayanan dinas selama kurun waktu 2016 sampai 2021 antara lain :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kapasitas transportasi	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan darat	Sistem jaringan lalu lintas untuk mendukung konektivitas wilayah, karena belum tersedianya rencana induk jaringan jalan / transportasi

		<p>Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi seperti terminal, shelter/halte/pangkalan</p>	<p>Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem kota sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal</p>
--	--	---	---

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Keselamatan transportasi	<p>Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor masih terbatas pada perlengkapan dan peralatan pengujian model lama dan belum terbarukan</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya (angkutan orang dan barang) secara berkala</p>	<p>fungsiional penguji kendaraan masih terbatas jumlahnya karena banyak yang pensiun</p> <p>Kurangnya sosialisasi dan ketersediaan pengujian kendaraan keliling yang dapat menjangkau wilayah – wilayah yang jauh dari perkotaan</p>
		Kurang nya marka dan rambu – rambu jalan	Fasilitas keselamatan lalu lintas masih belum memenuhi kecukupan dari sisi kuantitas, dibandingkan dengan kebutuhan dari total jaringan jaringan lalu lintas kabupaten
3.	Pelayanan Transportasi	Rendah nya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang tercermin dari rata rata <i>load factor</i> angkutan kota hanya 0,3	Rendah nya tingkat kenyamanan pada angkutan umum perkotaan dan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor

Permasalahan-permasalahan tersebut di bidang perhubungan masih berdampak pada pelayanan dinas selama kurun waktu 2021 sampai 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum; belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan; rendahnya disiplin pengguna jalan; belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin; belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas; rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi; masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah; perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor; masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat, masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi, belum optimalnya pembangunan transportasi umum massal di Perkotaan.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. Belum terwujudnya sistem jaringan transportasi dan angkutan yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan;
4. Terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan *multi faceted (cara pandang yang berbeda)* (*level macro= tata ruang, Level Mezzo=transport demand, dan Level Micro =Street level*).

Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, dirumuskan isu strategis perhubungan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi -Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan -belum optimalnya andalalin -belum adanya rencana induk transportasi, jaringan jalan 	Fasilitas perlengkapan jalan yang belum optimal
	Masih kurangnya lokasi parkir yang memadai/ belum optimalnya pengelolaan lahan parkir	
	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan darat	
2	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan terminal Belum optimalnya kelaikan angkutan umum /barang Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman Masih terbatasnya peralatan untuk pengujian kendaraan bermotor 	
	Belum optimalnya kelaikan angkutan umum /barang	
	Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	
	Masih terbatasnya peralatan untuk pengujian kendaraan bermotor	

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan perumusan visi yang mengacu pada permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah serta janji politik dari kepala daerah yang terpilih, maka visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD periode 2022-2026, adalah sebagai berikut:

CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD tahun 2021-2026 memiliki makna filosofis seperti Penjelasan Visi Cianjur Manjur Berakhlak Mulia

Manjur Memiliki makna : ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab dan mujarab. Manjur merupakan singkatan dari MANDIRI-MAJU-RELIGIUS Mandiri Memiliki makna berdiri sendiri Maju Mengandung makna berada pada tingkat peradaban

yang tinggi Religius Memiliki makna sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Penjelasan Visi Akhlak Mulia Merupakan barometer yang akan menentukan baik buruknya seseorang, baik buruknya sebuah masyarakat. Akhlak manusia terhadap Tuhan yang dimanifestasikan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, akhlak manusia terhadap sesama (akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, sampai akhlak beragama), serta akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia (hidup harmoni dengan lingkungan alam), adalah tiga cakupan penting yang akan menjadi sasaran penting dalam pembangunan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi memberikan gambaran yang lebih jelas atas penggambaran visi yang ingin dicapai dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur pada periode 2021-2026 yang dilakukan dengan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;

4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Program strategis untuk Dinas Perhubungan sebagai pendukung pada Misi ke 3 yaitu : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan Misi ke 3 yaitu : Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai;

Indikator tujuannya : Indeks pembangunan infrastruktur daerah

Sasaran misi ke 3 :

1. Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak
3. Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana

Indikator sasarannya :

1. Persentase panjang jalan kabupaten antar pusat pertumbuhan dalam kondisi baik
2. Rasio rumah layak huni
3. Indeks Risiko Bencana

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020 - 2024

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah: mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 yang juga merupakan RPJMN ke IV dalam RPJPN 2005 – 2025, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yakni:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Ke-empat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasinya.

Ke-7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik. 7 (tujuh) agenda

pembangunan nasional tersebut menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 – 2024 dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden pada tahun 2020 – 2024.

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional

di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 33 pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian on time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.

Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;

2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015 – 2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Untuk mewujudkan tujuan:
 1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
 2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan,

meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;

3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Stakeholders Perspective Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:
 - ♣ IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional. Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:
 - ♣ IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan.
 2. Customer Perspective Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:
 - ♣ IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
 - ♣ IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi.
 3. Internal Process Perspective;
 - a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - ♣ IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.

- b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - ♣ IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten.
- c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - ♣ Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi.
- d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - ♣ Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".
- e. Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - ♣ Indeks RB Kementerian Perhubungan

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Proinsi Jawa Barat 2014– 2018

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) 2005-2025 yaitu tahap Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat. Dengan mempeftimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2018-2023 yaitu:

" Terwujudnya Jawa Barat Juara lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "

Makna yang terkandung dalam visi Jawa Barat 2018 - 2023 dijabarkan sebagai berikut :

Jabar Juara Lahir : Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan Batin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatann pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Peftumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan

Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastuKur untuk pemerataan pembangunan. InfrastruKur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, sefta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam istilah tata kelola, branding yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai 'Good Govemance'atau 'Tata Kelola yang BaiK. Good Govemance sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efeKivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Pendekatan provinsi cerdas (smart province) akan diterapkan di Jawa Barat untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efeKif, efisien, dan handal.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi: Relijius - Bahagia - Adil - Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan

yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Dari kelima misi tersebut bidang Perhubungan mengemban tugas pada Misi Ketiga: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas wilayah dan Penataan Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, memiliki tugas pada Misi 3, Tujuan 1, dan Sasaran 2 :

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah

Tujuan 1 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian Dengan Indikator Tujuan/Sasaran adalah : Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat 49,

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang selaras dengan Bidang Perhubungan yaitu : Tujuan 1 pada misi 3 yaitu terwujudnya percepatan pertumbuhan dan Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, untuk Tahun 2019 sesuai RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, terdapat 4 (empat) Tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2. Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan Umum di Jawa Barat
4. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan

sesuai hasil asistensi dengan Kemendagri pada tanggal 1 November 2018 dan Bappeda Provinsi Jawa Barat tanggal 7-8 November 2018 di Kuningan, serta dilanjutkan dengan konsultasi dan pembahasan di Bappeda Provinsi Jawa Barat dan sesuai tugas dan fungsinya untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan terdapat 2 (dua) tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan di Jawa Barat.

Adapun Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sesuai hasil asistensi dengan Kemendagri pada tanggal 1 November 2018 dan Bappeda Provinsi Jawa Barat tanggal 7-8 November 2018 di Kuningan, serta dilanjutkan dengan konsultasi dan pembahasan di Bappeda Provinsi Jawa Barat dan sesuai tugas dan fungsinya untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, terdapat 5 (lima) sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan

2. Meningkatnya Penyediaan Parasarana Perhubungan Udara
3. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan moda perkeretaapian
5. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Jawa Barat

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan angkutan umum di Jawa Barat
2.	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi umum
3.	Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan	Meningkatnya angkutan umum di Jawa Barat memenuhi standat keselamatan

adalah sebagai berikut :

	Angkutan Umum di Jawa Barat	
--	--------------------------------	--

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018-2023.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011 – 2031 diarahkan menuju :

1. Berkembangnya wilayah Kabupaten Cianjur dengan memanfaatkan potensi dan prospek pengembangan wilayah
2. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah yang relatif maju (terutama wilayah utara) dengan wilayah yang kurang berkembang (yaitu wilayah tengah – selatan) melalui optimasi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sistem keterkaitan ruang (*spatial linkages*).

Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), dengan pemantapan jalan arteri primer dan terminal terminal antarwilayah.
2. Pemantapan aksesibilitas intrawilayah dengan pemantapan dan pembangunan jaringan jalan primer.
3. Pemantapan pusat pertumbuhan wilayah (Perkotaan Cianjur) dengan fungsi pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten.
4. Pemantapan pusat pertumbuhan :
 - Perkotaan Cianjur sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan prasarana dan sarana transportasi dan pendukungnya.

- Perkotaan Cipanas sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan agribisnis dan pariwisata.
- Perkotaan Sukanagara sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan agribisnis.
- Perkotaan Sindangbarang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan pengembangan sub sektor perikanan yang diproyeksikan melayani Cianjur bagian selatan.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Cianjur meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

Rencana sistem pusat kegiatan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem perdesaan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan disusun secara hirarkhis yang terdiri dari PKL (Pusat Kegiatan Lokal) – PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PKL yaitu PKL Perkotaan Cianjur, dan PKL Perkotaan Sindangbarang, PKL Perkotaan Cipanas, serta PKL Perkotaan Sukanagara.

PKL Perkotaan Cianjur mengemban fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.

PKL Perkotaan Sindangbarang mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan.

PKL Perkotaan Sukanagara mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah, dan pertambangan.

PKL Perkotaan Cipanas mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah.

PPK Pacet, PPK Ciranjang, PPK Warungkondang, PPK Pagelaran, PPK Cidaun mengemban fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan kawasan.

2. Rencana Sistem Perdesaan

Rencana sistem perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PPL sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara terdiri : PPL Cikalongkulon dan PPL Bojongpicung;
- b. Wilayah Tengan terdiri : PPL Takokak dan PPL Campakamulya;
- c. Wilayah Selatan terdiri : PPL Cibinong, PPL Naringgul, dan PPL Agrabinta.

Seluruh PPL berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi pertanian skala antardesa. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

1. Rencana Sistem Prasarana Utama

Rencana sistem prasarana utama meliputi pembangunan dan pengembangan :

- a. Jaringan Jalan;
- b. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api;
- c. Rencana Sistem Transportasi Laut;
- d. Rencana Sistem Transportasi Udara;

Dari telaahan terhadap rencana pembangunan prasarana jalan untuk lima tahun ke depan disimpulkan bahwa penyelenggaraannya diawali dengan tersedianya pengaturan pembinaan serta pengelolaan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kapasitas institusional pengelola, penerima manfaat, serta pelaku pembangunan lainnya, terbentuknya jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat pertumbuhan. Perhatian difokuskan pada akses menuju pusat layanan utama dimana konsentrasi kegiatan sosial ekonomi berada yaitu Kecamatan Cianjur, Cipanas dan Pacet yang mendukung perkembangan Kabupaten Cianjur serta pembangunan jalan di wilayah pembangunan tengah dan selatan yang dilakukan untuk menciptakan perkembangan pada wilayah tersebut serta meningkatkan akses ke wilayah yang tertinggal dan sebagian kecamatan yang sulit dijangkau.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pergerakan orang, barang

dan jasa, dapat dilakukan diantaranya melalui dukungan terhadap penyediaan jaringan jalan nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Cianjur yaitu dengan rencana pembangunan:

- a. Jaringan jalan bebas hambatan Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang yang melewati kecamatan Gekbrong, Warungkondang, Cilaku, Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang dan Haurwangi.
- b. Jalan lingkar kota Cianjur – Rawabango – Perintis Kemerdekaan yang meliputi kecamatan Karangtengah dan kecamatan Cianjur.
- c. Jalan Lingkar Selatan Kota Cianjur – Perintis Kemerdekaan – Pasir Hayam yang berlokasi di Kecamatan Cilaku.
- d. Jalan Lingkar Barat Cianjur – Rancagoong – Cijedil yang berlokasi di Kecamatan Cilaku, Cianjur dan Cugenang.

Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten 5 tahun ke depan meliputi pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer, terbangunnya dan berkembangnya jalan lokal primer dan pengembangan jaringan jalan strategis (JJS) kabupaten, yaitu dengan rencana pembangunan:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Kolektor meliputi :

Pengembangan ruas jalan Warungkondang – Cipadang – Karyamukti – Sukajembar – Paldua – Kadupandak – Cijati – Leles – Agrabinta;

Pengembangan ruas jalan Cidaun – Wangunjaya – Melati – Sukabakti – Purutwates;

- b. Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan lokal meliputi :

Pengembangan jaringan jalan ruas Agrabinta – Cibinong – Cikadu – Naringgul;

Pengembangan jaringan jalan ruas Sindangbarang – Muara, Cikadu – Simpang, Pancuhtilu – Cigerendam – Cikadu;

Berkaitan dengan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, pada saat ini keberadaan terminal di Kabupaten Cianjur kurang berfungsi secara optimal, dalam mendukung rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Cianjur maka pengembangan sistem terminal adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku;
- b. Pembangunan terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Takokak, Kecamatan

Pagelaran, Kecamatan Leles, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun;

- c. Pengembangan terminal barang berupa Sub Terminal Agribisnis (STA) Cigombong di Kecamatan Pacet;
- d. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cidaun;
- e. Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah dan Rencana Pembangunan Jembatan Timbang di Kecamatan Haurwangi;
- f. Pengembangan sarana pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Kantor Dinas Perhubungan di Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

Dari telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dengan fokus rencana pengembangan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan lima tahun kedepan disimpulkan bahwa penyelenggaraannya dilakukan dengan upaya penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan pembangunan terminal penumpang Tipe C sebagai berikut :

1. Terminal tipe C Cipanas;
2. Terminal tipe C Warungkondang;
3. Terminal tipe C Kecamatan Mande;
4. Terminal tipe C Cikalongkulon;
5. Terminal tipe C Ciranjang;
6. Terminal tipe C Campakamulya;
7. Terminal tipe C Takokak;
8. Terminal tipe C Pagelaran;
9. Terminal tipe C Leles;
10. Terminal tipe C Agrabinta;
11. Terminal tipe C Sindangbarang;
12. Terminal tipe C Naringgul;
13. Terminal tipe C Cidaun;
14. Terminal tipe C Sukanagara, dan
15. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun dan Kecamatan Pacet.

Sementara, rencana jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

- a. Lintas penyeberangan danau meliputi ; Jangari – Palumbon – Calincing – Maleber – Cipeundeuy dan Citembong – Buniayu – Cipeundeuy.
- b. Dermaga penyeberangan danau meliputi ; Dermaga Jangari Kebun Coklat di Kecamatan Mande, Dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon, dan Dermaga Palalargon di Kecamatan Ciranjang.

Mengingat penggunaan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Cianjur yang tingkat kebutuhan penerima manfaatnya belum sekuat kebutuhan layanan jaringan jalan serta prasarana angkutan jalan, maka untuk rencana jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan dalam 5 tahun ke depan diarahkan pada penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan pembangunan lintas penyeberangan danau dan pengembangan dermaga penyeberangan danau.

Keselarasan Penataan Ruang pada RPJMD dengan RTRW

Penetapan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Kebijakan pembangunan berbasis spasial (keruangan) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang Perencanaan. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cianjur. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola

ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Berdasarkan tinjauan rencana tata ruang di tingkat atasnya, dalam konteks rencana pola ruang RTRWN, Kabupaten Cianjur termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta Berdasarkan kebijakan perubahan RTRW Nasional Dan RTRW Provinsi Jawa Barat yang termasuk Penetapan Kawasan Startegis Nasional (KSN) dan Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pada wilayah Kabupaten Cianjur. Fokus pengembangan pusat kegiatan wilayah berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cidaun, yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta merupakan kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yangberkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Cianjur dengan mempertimbangkan potensi, persoalan, dan prospek pengembangan wilayah, serta harapan penataan ruang Kabupaten Cianjur 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2041 adalah: *“Mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan”*. Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Cianjur dijabarkan dalam 6 sasaran utama, meliputi:

- 1) Mewujudkan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagai basis dalam mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi konsep agrowisata.

- 2) Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mengakomodasi keterkaitan antar kawasan guna mengembangkan sektor perekonomian produktif dan lingkungan yang berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan keserasian antar kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- 4) Mengarahkan pengembangan sistem pusat - pusat kegiatan, pusat – pusat permukiman perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan sistem prasarana wilayah.
- 5) Mengendalikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat dan terkordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
- 6) Melibatkan masyarakat dalam proses penataan ruang Kabupaten Cianjur.

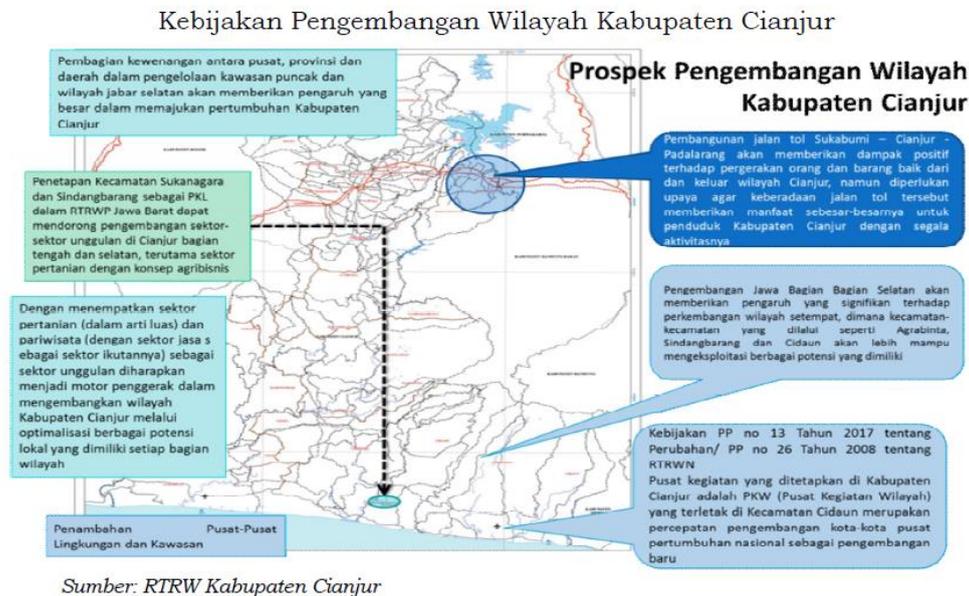
Menyikapi hal tersebut, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Cianjur tersebut dapat dicapai melalui upaya membenahi dan membangun ruang Kabupaten Cianjur. Membenahi ruang dimaksudkan untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan dengan pertumbuhan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta melakukan

upaya-upaya pelestarian dan rehabilitasi terhadap pemulihan kondisi lingkungan yang ada. Membangun ruang dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya ruang yang ada dalam rangka meningkatkan nilai tambah sebesar - besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan Pengembangan Wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk meminimalisasi

kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Gambaran kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Cianjur

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur

Strategi kebijakan pengembangan wilayah terdiri dari:

- 1) Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan kawasan puncak dan wilayah jajar selatan akan memberikan pengaruh yang besar dalam memajukan pertumbuhan Kabupaten Cianjur, mengingat kawasan -kawasan tersebut merupakan kawasan strategis yang menjadi konsern pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat lebih fokus pada pengembangan internal wilayah.
- 2) Pengembangan Jawa Bagian Bagian Selatan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan wilayah setempat, dimana kecamatan - kecamatan yang dilalui seperti Agrabinta, Sindangbarang dan Cidaun akan lebih mampu mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki untuk lebih berkembang dengan didukung oleh jaringan infrastruktur dan sarana sosial ekonomi yang lebih memadai.

3) Pembangunan jalan tol Sukabumi – Cianjur - Padalarang akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan orang dan barang baik dari dan keluar wilayah Cianjur, namun diperlukan upaya agar keberadaan jalan tol tersebut memberikan manfaat sebesar - besarnya untuk penduduk Kabupaten Cianjur dengan segala aktivitasnya.

4) Dengan menempatkan sektor pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata dengan sektor jasa sebagai sektor lainnya) sebagai sektor unggulan diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Cianjur melalui optimalisasi berbagai potensi lokal yang dimiliki setiap bagian wilayah.

5) Penetapan Kecamatan Sukanagara dan Sindangbarang sebagai PKL dalam RTRWP Jawa Barat dapat mendorong pengembangan sektor – sektor unggulan di Cianjur bagian tengah dan selatan, terutama sektor pertanian dengan konsep agribisnis.

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat - pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Cianjur meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi dan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten.

1) Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Cianjur Rencana pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Cianjur, selain merujuk kepada penetapan sistem permukiman dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, juga didasarkan atas tipologi kecamatan.

2) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang.

3) Rencana Sistem Jaringan Energi Rencana pengembangan sistem jaringan energi/listrik meliputi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan kelistrikan yang meliputi : infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung serta Jaringan Infrastruktur Penyalur Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

4) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Cianjur terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak, yang meliputi:

a. Jaringan tetap

(1) Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;

(2) Pengaturan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cianjur;

(3) Pengembangan Jaringan *Cyber Province* I; dan

(4) Pengembangan Prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan dan perdesaan.

b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bergerak yaitu karingan bergerak terestrial yang meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan;

c. Jaringan telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

5) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Rencana pengembangan Sistem jaringan sumber daya air mencakup:

a. Sistem jaringan irigasi;

b. Sistem pengendalian banjir, meliputi :

(1) Jaringan pengendalian bajir, dan

(2) Bangunan pengendalian banjir

c. Bangunan sumber daya air

6) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi:

a. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

b. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

c. Rencana Sistem Jaringan Persampahan

d. Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

e. Rencana Sistem Drainase

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang memberi arahan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kawasan peruntukan lindung kabupaten dapat terdiri atas Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Kawasan Peruntukan budidaya kabupaten terdiri atas Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman serta Kawasan Lainnya.

d. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Kebijakan pengembangan wilayah, struktur ruang, pola ruang, ditindaklanjuti dalam arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dirumuskan berdasarkan masukan seluruh pemangku kepentingan, terdiri dari indikasi program utama, lokasi, pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pembiayaan. Indikasi program memuat indikasi program utama/ indikasi kegiatan sektoral yang perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahunan, dan sektoral. Indikasi program, meliputi:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang Kabupaten Cianjur, mencakup:
 - 1) Perwujudan sistem pusat permukiman dalam wilayah Kabupaten Cianjur, termasuk sistem pusat permukiman dalam sistem nasional, yaitu PKW, PKL, PPK dan PPL.
 - 2) Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan laut;

- 3) perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
- 4) perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- 5) perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- 6) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

- (1) perwujudan sistem jaringan air minum
- (2) perwujudan sistem jaringan persampahan
- (3) perwujudan sistem jaringan pengolahan limbah
- (4) perwujudan sistem jaringan drainase
- (5) perwujudan sistem jaringan jalur ruang evakuasi bencana

b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Cianjur, mencakup:

- 1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung;
 - (1) Badan Air
 - (2) Kawasan hutan lindung;
 - (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - (4) Kawasan perlindungan setempat;
 - (5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - (6) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;
 - (7) Kawasan lindung geologi;
 - (8) Kawasan ekosistem mangrove.
- 2) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
 - (1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - (2) Kawasan hutan rakyat;
 - (3) Kawasan peruntukan pertanian;
 - (4) Kawasan peruntukan perikanan;
 - (5) Kawasan pertambangan dan energi;
 - (6) Kawasan peruntukan industri;
 - (7) Kawasan peruntukan pariwisata;
 - (8) Kawasan peruntukan permukiman;
 - (9) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

c. Perwujudan kawasan-kawasan strategis Kabupaten Cianjur.

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Dari hasil telaahan terhadap Tugas dan Fungsi Dinas, Renstra Kemetrian Perhubungan dan Resnstra Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur diperoleh permasalahan umum Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Realisasi Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, dibidang perhubungan belum optimal 2 Realisasai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan belum optimal 3 Realisasi pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam dibidang perhubungan belum optimal 	LAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realiasi pengangaran tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan alokasi anggaran, diluar kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan prima dibidang perhubungan 2. Belum memadainya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian transportasi 3. Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi 4. Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas, dan regulasi.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Terhadap Renstra Propinsi dan Kementerian	. Pelayanan sistem antar moda dermaga penyeberangan Waduk Cirata belum berfungsi optimal	RENSTRA	. Belum tersedia terminal angkutan darat di Kebun Coklat, sebagai terminal peralihan antar moda dari dermaga	. Penyusunan pedoman teknis konversi BBM dan Gasifikasi Angkutan oleh pemerintah pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan terminal 2. Belum tersedianya dokumen rancangan teknis terminal 3. Belum tersedianya dokumen bahan regulasi konversi BBM dan Gasifikasi Angkutan
	Pengurangan emisi karbon, berimplikasi terhadap aplikasi teknologi angkutan yang ramah lingkungan, terutama angkutan diperkotaan		. Belum tersedianya regulasi daerah ttg konversi BBM dan gasifikasi angkutan		
Kajian Terhadap RTRW	Realisasi pembangunan prasarana perhubungan (terminal) menurut sistem kota-kota belum terwujud	RTRW Kabupaten Cianjur	Sebagian dokumen perencanaan transportasi belum disusun sesuai tuntutan perencanaan makro kabupaten	Pengaturan penganggaran pengadaan lahan, diluar kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya pranata perencanaan dan persiapan pembangunan terminal angkutan penumpang (type C) sesuai arahan struktur ruang dalam RTRW. 2. Masih kurang sinergitas perencanaan pengadaan lahan untuk kebutuhan terminal

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Cianjur dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Diantaranya sebagai berikut :

1. Isu- -isu RTRW Kabupaten Cianjur

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur periode 2021-2026 memperhatikan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Wilayah perencanaan RTRW terdiri atas 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 desa. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas:

1. Perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisir kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembang agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah;
3. Pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembang pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;
4. Pemantapan prasarana peran dan fungsi yang ditetapkan;
5. Perwujudan kawasan lindung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan budi daya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah;
6. Perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;

7. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Selain 7 kebijakan penataan runag wilayah, ditambah dengan kebijakan terkait pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

2. Isu-isu Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberika amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan kajian KLHS terdapat GAP pada MISI 3 sasaran 1 yaitu rendahnya akses terhadap sisitem transportasi dan jaringan yang aman, terjangkau dan mudah diakses, utamanya bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua. Dengan adanya GAP tersebut didapat hasil rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk misi 3 sasaran 1 yaitu :

1. Membangun sistem transportasi publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akses transportasi publik yang memadai;
3. Arahkan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan;
4. Bimbingan dan pelatihan bagi pengemudi tentang smart driving;
5. Membangun integrasi antar moda transportasi;

6. Menyiapkan fasilitas penggunaan kendaraan umum yang aman, memadai dan mudah dijangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas;
7. Menerapkan wajib uji emisi.

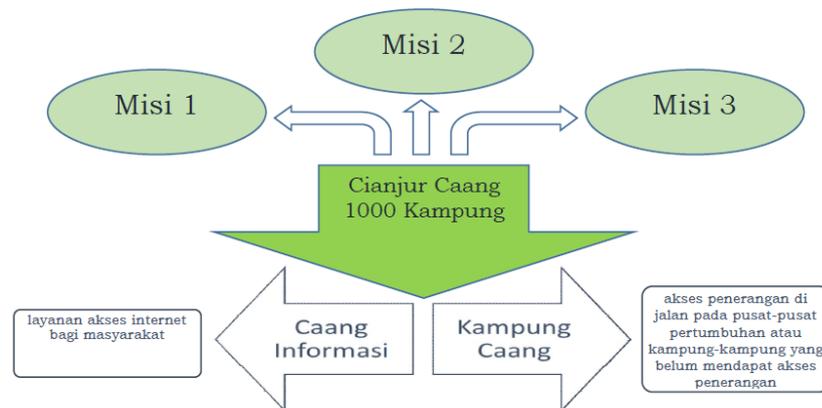
“CIANJUR CAANG” 1.000 Kampung

1) Caang Informasi

Cianjur Caang Informasi adalah layanan akses internet bagi masyarakat yang dikembangkan melalui penyediaan lokus-lokus wifi gratis, penanganan blank spot jaringan, DED Jaringan, sosialisasi/bimtek literasi digital.

2) Kampung Caang

Kampung Caang adalah program untuk memberikan akses penerangan di jalan pada pusat-pusat pertumbuhan atau kampungkampung yang belum mendapat akses penerangan di Kabupaten Cianjur. Perwujudan kampung caang pada aspek penerangan ini diwujudkan oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. Adapun pembagian pekerjaan sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota terdiri dari pekerjaan pembangunan baru dan pemeliharaan. Pembangunan PJU baru terdiri dari pekerjaan 1) Pengadaan dan pemasangan Stang PJU dan 2) Pengadaan dan pemasangan Tiang PJU. Sedangkan Pemeliharaan PJU terdiri dari 1) Pergantian lampu PJU Sodium ke LED, 2) Pergantian lampu PJU LED yang rusak dan 3) Perbaikan Jaringan listrik. Jumlah akses penerangan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kampung caang ini adalah sebanyak 108 desa dengan perkiraan kebutuhan adalah 2 unit PJU setiap desa dengan target 1000 titik.



Keterkaitan program MANJUR Cianjur Caang 1000 Kampung dengan misi Cianjur.

Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, dirumuskan isu strategis perhubungan sebagai berikut:

1. Fasilitas perlengkapan jalan yang belum optimal

Permasalahan isu strategis ini didapatkan dari beberapa permasalahan yaitu:

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi;
- Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- Belum optimalnya Andalalin;
- Belum adanya rencana induk transportasi jaringan jalan

Dengan adanya permasalahan tersebut kedepan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur akan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten Cianjur.

2. Pelayanan Angkutan Darat yang belum Optimal

Pelayanan angkutan darat sangatlah penting bagi kepentingan umum oleh hal ini harus diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Pelayanan angkutan darat yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

- Belum Optimalnya pelayanan terminal;

- Belum optimalnya kelaikan angkutan umum /barang;
- Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;
- Masih terbatasnya peralatan untuk pengujian kendaraan bermotor.

Permasalahan dan Isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi -Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan -belum optimalnya andalalin -belum adanya rencana induk transportasi, jaringan jalan	Fasilitas perlengkapan jalan yang belum optimal
	Masih kurangnya lokasi parkir yang memadai/ belum optimalnya pengelolaan lahan parkir	
	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan darat	
2	Belum optimalnya pelayanan terminal	Pelayanan Angkutan darat belum optimal
	Belum optimalnya kelaikan angkutan umum /barang	
	Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	
	Masih terbatasnya peralatan untuk pengujian kendaraan bermotor	

Adapun Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur yaitu : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dalam mewujudkan target dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

“Terciptanya Transportasi yang Aman , Nyaman dan Berkeselamatan ”

Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan

4.2 Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Perhubungan “

Dengan membangun prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan fasilitas perhubungan seperti rambu, marka, PJU, dll; serta meningkatkan kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, penginventarisasian angkutan umum, pengawasan dan pengelolaan perparkiran serta pengamanan lalu lintas pada jam sibuk dan hari raya.

Sedangkan Indikator Sasaran nya yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
2. Persentase Layanan Angkutan;
3. Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2021-20

TUJUAN / IKK SASARAN DAN TARGET (SEBELUM)										TUJUAN / IKK SASARAN DAN TARGET (SESUDAH)											
No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Kondisi Awal 2021 (bulan Okt)	Realisasi		Target			No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/ Sasaran PD	Kondisi Awal 2021 (bulan Okt)	Realisasi		Target				
					2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi		Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi	91,19	95,58%	90,11%	100%	100%	100%	1	Terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan		Persentase penurunan kejadian kecelakaan	N/A	-30,77%	1,96%	2%	2%	2%		
			Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	98,67%	100,98%	101,57%	100%	100%				100%	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	98,67%	100,98%	101,57%	100%	100%	100%
				Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	74,91%	77%	68,44%	100%	100%				100%		Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	74,91%	77%	68,44%	100%	100%	100%
				Persentase Layanan Angkutan	50,00%	49,99%	50,49%	53,68%	56,48%				58,85%		Persentase Layanan Angkutan	50,00%	49,99%	50,49%	53,68%	56,48%	58,85%
2	Meningkatnya Pengelolaan manajemen perkantoran Dishub		Persentase Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	Meningkatnya Pengelolaan manajemen perkantoran Dishub		Persentase Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

		Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dishub	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dishub	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dishub	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dishub	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	---	------	------	------	------	------	------	--	--	--	---	------	------	------	------	------	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan menjalankan misi, yang ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan:

5.1.1 Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan

Strategi pokok ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal kabupaten sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis melalui peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia, optimalisasi pelayanan uji kendaraan bermotor secara berkala dalam kerangka menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemutahiran database transportasi, pembinaan manajemen penyedia jasa angkutan, upaya aksi tertib lalu lintas dan perparkiran, manajemen rekayasa, andalalin.

5.1.2 Strategi Pembangunan Perhubungan

Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas transportasi meliputi pembangunan terminal dan penyediaan aksesibilitas masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Cianjur.

Strategi penanganan keselamatan melalui manajemen aman, sistem aman, masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan aman (*Safer Management; Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road*).

5.2 Kebijakan

5.2.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan meliputi hal sebagai berikut :

1. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang / jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah;
2. Mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;
3. Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha;
4. Perbaiki kualitas sumber daya manusia transportasi dan komunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien;

Untuk lebih jelas strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada **Tabel 5.1.**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Cianjur Mandiri, Maju Religius dan Berakhlak Mulia		
MISI :	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terciptanya Transportasi yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan	1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Perhubungan	1. peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang belum memiliki penerangan untuk mewujudkan 1000 kampung Caang
		2. Meningkatkan ketersediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
		3. Mengembangkan sistem manajemen pelayanan	Pengembangan Sistem Parkir Berlangganan untuk meningkatkan PAD
			Sistem Pembayaran Kir Non Tunai Kabupaten Cianjur (SIM MANJUR)

VISI :	Cianjur Mandiri, Maju Religius dan Berakhlak Mulia		
MISI :	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi		
		4. Pembangunan terminal di pusat pelayanan kawasan (ppk)	Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah
		5. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berdasarkan inspeksi keselamatan jalan	kegiatan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak terkait terutama kepolisian
		6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara fasilitas perlengkapan jalan	
		7. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengaadn dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan	
		8. Memaksimalkan layanan pengujian kendaraan bermotor ke seluruh pelosok Cianjur	Pengendalian kelaikan kendaraan melalui prosedur administratif

VISI :	Cianjur Mandiri, Maju Religius dan Berakhlak Mulia		
MISI :	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi		
		9. Meningkatkan peran kegiatan pemeriksaan di jalan (rampcheck)	Menyusun kerjasama angkutan perintis yang berbatasan dengan kabupaten/kota
		10. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur terkait angkutan perintis	Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun
		11. Menyediakan kantong parkir dalam mengurangi kemacetan	Kegiatan pengawasan dengan bekerjasama dengan TNI, Polri dan pihak terkait
		12. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama anak usia dini tentang keselamatan	
		13. memaksimalkan kegiatan pengaturan dan pengawasan lalulintas di jalan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2021 - 2026. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021 - 2026.

Pada pemutakhiran Renstra 2021-2026 berdasarkan Rencana program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Hasil Pemutakhiran Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada perubahan nomenklatur tersebut terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan, indicator maupun perubahan satuan dan target kinerja. Khusus terkait perubahan target kinerja dilampirkan dalam bentuk Berita Acara perubahan target kinerja.

Berikut program dan kegiatan serta sub kegiatan bisa dilihat pada table dibawah berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan, Sub-Kegiatan	IK Tujuan / Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja						Kondisi pada akhir pada akhir periode Renstra		Unit Kerja / Bidang Penanggungjawab	Keterangan Sub Kegiatan
						2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Pengelolaan manajemen perkantoran Dishub			Persentase Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		100%	16,088,093,360	100	18,106,399,181	100	25,500,000,000	100%	25,550,000,000	100%	26,000,000,000	100%	111,244,492,541	SEKRETARIAT DISHUB	
		Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan		Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan		100%	16,088,093,360	100%	18,106,399,181	100%	25,500,000,000	100%	25,550,000,000	100%	26,000,000,000	100%	111,244,492,541		
A			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	221,389,400	100%	243,009,000	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	1,574,398,400		
				Persentase Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	100%	100%	9,174,342,719	100%	9,263,028,183	100%	11,383,075,400	100%	11,393,075,400	100%	11,403,075,400	100%	52,616,597,102		
				Persentase Administrasi Kepegawaian dan Umum	100%	100%	1,608,013,393	100%	1,670,065,263	100%	1,928,000,000	100%	1,928,000,000	100%	1,998,000,000	100%	9,132,078,656		
				Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1,370,852,278	100%	1,756,660,177	100%	6,099,466,600	100%	6,129,466,600	100%	6,369,466,600	100%	21,725,912,255		

				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	3,713,495,570	100%	5,173,636,558	100%	5,729,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,849,458,000	100%	26,195,506,128		
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	221,389,400	100%	243,009,000	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	1,574,398,400	Sekretariat	D
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	3	48,606,000	3	49,475,250	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	15	248,081,250	Sekretariat	D
2			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2	18,059,500	2	20,704,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	158,763,500	Sekretariat	D
3			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	2	19,813,000	2	36,552,500	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	176,365,500	Sekretariat	D

4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	134,910,900	4	100,751,250	4	180,000,000	4	190,000,000	4	200,000,000	20	805,662,150	Sekretariat	D
5			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	-	1	35,526,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	37	185,526,000	Sekretariat	D
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	9,174,342,719	100%	9,263,028,183	100%	11,383,075,400	100%	11,393,075,400	100%	11,403,075,400	100%	52,616,597,102	Sekretariat	D
6			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	70	8,894,996,819	70	8,940,207,183	70	10,908,075,400	75	10,918,075,400	80	10,928,075,400	80	50,589,430,202	Sekretariat	D

7			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1	97210900	1	97,225,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	554,435,900	Sekretariat	D
8			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	49,811,000	1	48,636,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	308,447,000	Sekretariat	D
9			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Sekretariat	D
10			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1	17,317,000	1	22,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	144,317,000	Sekretariat	D

11			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12	115,007,000	12	154,960,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	60	869,967,000	Sekretariat	D
III			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	656,130,250	100%	736,876,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	4,393,006,250	Sekretariat	D
12			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	321,793,000	3	243,375,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	14	1,615,168,000	Sekretariat	D
13			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	Sekretariat	D

14			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Sekretariat	D	
15			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	0	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	300	150,000,000	Sekretariat	D	
16			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50	148,823,250	203	277,600,000.00	50	200,000,000	50	200,000,000.00	50	200,000,000.00	403	1,026,423,250	Sekretariat	D	
17			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	185,514,000.00	12	215,901,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	60	1,151,415,000	Sekretariat	D	
IV			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik		100%	100%	951,883,143	100%	933,189,263	100%	928,000,000	100%	928,000,000	100%	998,000,000	100%	4,739,072,406	Sekretariat	D

18			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10,000,000	5	10,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000	25	85,000,000	Sekretariat	D
19			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	72,450,050	40	105,039,700	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	200	477,489,750	Sekretariat	D
20			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	35,469,910	5	102,154,961	10	68,000,000	10	68,000,000	10	80,000,000	45	353,624,871	Sekretariat	D
21			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	45,550,000	2	45,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	80,000,000	12	310,550,000	Sekretariat	D
22			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	353,325,450	15	186,933,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	75	1,290,258,450	Sekretariat	D
23			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	15,090,000	2	12,740,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10	92,830,000	Sekretariat	D

24			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	419,997,733	12	471,321,602	12	400,000,000	12	400,000,000	12	438,000,000	60	2,129,319,335	Sekretariat	D
V			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	981,465,674	100%	1,302,755,000	100%	5,599,466,600	100%	5,629,466,600	100%	5,869,466,600	100%	19,382,620,474	Sekretariat	D
25			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	-	3	215,000,000	1	100,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	6	575,000,000	Sekretariat	D
26			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	-			2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,140,000,000	6	3,140,000,000	Sekretariat	D
27			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		14	520,563,575	10	882,435,000	10	3,349,466,600	10	3,549,466,600	10	3,549,466,600	54	11,851,398,375	Sekretariat	D
28			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		0	-	0	-	2	200,000,000	2	200,000,000	2	300,000,000	6	700,000,000	Sekretariat	D

29			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	-	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000	Sekretariat	D
30			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terlaksana		0	-	0	-	1	350,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	750,000,000	Sekretariat	D
31			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	460,902,099	10	205,320,000	10	400,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	50	1,766,222,099	Sekretariat	D
VI			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	3,713,495,570	100%	5,173,636,558	100%	5,729,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,849,458,000	100%	26,195,506,128	Sekretariat	D
32			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	30,000,000	Sekretariat	D
33			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	3,418,840,440	12	4,875,332,689	12	5,416,000,000	12	5,416,000,000	12	5,493,458,000	60	24,619,631,129	Sekretariat	D

34			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	288,655,130	12	292,303,869	12	307,458,000	12	307,458,000	12	350,000,000	60	1,545,874,999	Sekretariat	D
VII			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	389,386,604	100%	453,905,177	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,343,291,781	Sekretariat	D
35			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40	20,133,800.00	40	23,464,500	65	35,000,000	65	35,000,000	70	35,000,000	280	148,598,300	Sekretariat	D
36			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40	318,655,804	35	380,450,377	65	290,000,000	65	290,000,000	70	290,000,000	275	1,569,106,181	Sekretariat	D

37			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		10	20,997,000	10	20,995,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	116,992,000	Sekretariat	D
38			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	29,600,000	1	28,995,300	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	508,595,300	Sekretariat	D
	Terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan			Persentase penurunan kejadian kecelakaan	N/A	-30.77%		1.96%		2%	132,282,063,758	2%	56,801,128,045	2%	62,700,000,000	2%	351,947,696,670		
		Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas		98.83%	14,452,536,140	101.57%	73,156,079,624	100%	99,564,063,758	100%	23,150,000,000	100%	30,250,000,000	100%	240,572,679,522	Bidang Lalu lintas	
B			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program : (1).Persentase Perlengkapan Jalan Yang Memadai		100%	14,452,536,140	100%	73,156,079,624	100%	99,564,063,758	100%	23,150,000,000	100%	30,250,000,000	100%	240,572,679,522	Bidang Lalu lintas	
I			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Persentase dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang tersedia		0%	-			100%	800,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	2,300,000,000	Bidang Lalu lintas	

1			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000	Bidang Lalu lintas	D
2			Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1	200,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	500,000,000	Bidang Lalu lintas	D
3			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	-	0	-							0	-	Bidang Lalu lintas	A
4			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Baru	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	Bidang Lalu lintas	B
II			Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang tersedia		120,28%	13,092,695,540	104,71%	71,109,235,919	100%	89,755,161,183	100%	13,500,000,000	100%	20,500,000,000	100%	207,957,092,642	Bidang Lalu lintas	

5			Pembangunan Prasarana Jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	0	-	0	-	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	9	1,500,000,000	Bidang Lalu lintas	D	
6			Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	4643	2105	12,925,224,478	2911	70,212,634,319	300	84,255,161,183	300	8,000,000,000	300	15,000,000,000	5916	190,393,019,980	Bidang Lalu lintas	D
7			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	60	167,471,062	70	896,601,600	60	5,000,000,000	60	5,000,000,000	60	5,000,000,000	310	16,064,072,662	Bidang Lalu lintas	D	
III			Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa	100%	1,335,385,600	100%	1,984,753,750	100%	8,358,902,575	100%	8,250,000,000	100%	8,250,000,000	100%	28,179,041,925	Bidang Lalu lintas		
8			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	12	1,074,461,300	12	1,622,232,750.00	12	2,108,902,575	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	60	10,805,596,625	Bidang Lalu lintas	D	

9			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Baru	0	-	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000	Bidang Lalu lintas	B
10			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Baru	0	-	0	-	6	5,000,000,000.00	6	4,000,000,000	6	4,000,000,000	18	13,000,000,000	Bidang Lalu lintas	B
11			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		3	260,924,300	3	362,521,000.00	3	750,000,000.00	3	750,000,000.00	3	750,000,000	15	2,873,445,300	Bidang Lalu lintas	D

12			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan ,pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	0	-	0	-					-	0	-	Bidang Lalu lintas	A	
13			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	0	-	0	-						0	-	Bidang Lalu lintas	A	
IV			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	Persentase dokumen ANDALALIN yang tersedia	100%	24,455,000	100%	62,089,955	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	750,000,000	100%	2,136,544,955	Bidang Lalu lintas	
14			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	24,455,000	6	43,826,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	30	518,281,000	Bidang Lalu lintas	D
15			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	2	18,263,955						2	18,263,955	Bidang Lalu lintas	A	

16			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		0	-			2	100,000,000	2	100,000,000	2	200,000,000	6	400,000,000	Bidang Lalu lintas	B
17			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		0	-			6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	18	600,000,000	Bidang Lalu lintas	B
18			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi		0	-									0	-	Bidang Lalu lintas	A
19			Penetapan kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan		0	-									0	-	Bidang Lalu lintas	A
20			Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan		0	-			6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	18	600,000,000	Bidang Lalu lintas	C
		Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan		Persentase Layanan Angkutan		49.99%	2,520,859,650	50.49%	1,909,013,150	53.68%	13,450,000,000	56.48%	13,551,128,045	58.85%	12,350,000,000	58.85%	43,781,000,845	Bidang Angkutan	

			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program: (2).Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang tersedia		100.00%	2,520,859,650	100%	1,909,013,150	100%	13,450,000,000	100%	13,551,128,045	100%	12,350,000,000	100%	43,781,000,845	Bidang Angkutan	
V			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek yang diawasi		100%	1,423,944,650	100%	626,973,150	100%	1,350,000,000	100%	2,501,128,045	100%	1,300,000,000	100%	7,202,045,845	Bidang Angkutan	
21			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12	1,423,944,650	12	626,973,150	12	750,000,000	12	1,851,128,045	12	650,000,000	60	5,302,045,845	Bidang Angkutan	D

22			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4449	0	-	0	-	40	600,000,000	80	650,000,000	120	650,000,000	240	1,900,000,000	Bidang Angkutan	D
VI			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe c yang terkelola	2	1	1,096,915,000	1	1,282,040,000	3	11,250,000,000	3	10,250,000,000	3	10,250,000,000	3	34,128,955,000	Bidang Angkutan	
23			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		0	-	0	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	900,000,000	Bidang Angkutan	D
24			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2	0	-	0	-							0	-	Bidang Angkutan	A
25			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi		0	-	0	-	3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	9	9,000,000,000	Bidang Angkutan	B

26			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	-	0	-	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	3	15,000,000,000	Bidang Angkutan	B
27			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0		0	-							0	-	Bidang Angkutan	A
28			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan terpelihara	1	1,096,915,000	1	1,282,040,000							1	2,378,955,000	Bidang Angkutan	A
29			Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0				100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	300	450,000,000	Bidang Angkutan	B

30			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		0				2	2,800,000,000	2	1,800,000,000	2	1,800,000,000	6	6,400,000,000	Bidang Angkutan	B
31			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0										100	-	Bidang Angkutan	A
VII			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek yang tersedia		0	0	0	-	1	550,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,550,000,000	Bidang Angkutan	
32			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000	Bidang Angkutan	D

33			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-	0	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	2	350,000,000	Bidang Angkutan	D
34			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000	Bidang Angkutan	D
VIII			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin penyelenggaraan angkutan orang	0	0	0%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	Bidang Angkutan	

35			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	-	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	12	300,000,000	Bidang Angkutan	D
IX			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase dokumen inspeksi ,audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	0	0	0%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	600,000,000	Bidang Angkutan	
36			Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Terminal	0	0	0	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	36	300,000,000	Bidang Angkutan	D

37			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		0	0	0	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	36	300,000,000	Bidang Angkutan	D
		Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan		Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur		77.77%	1,369,475,365	68.44%	1,837,410,005	100%	11,830,000,000	100%	11,400,000,000	100%	11,350,000,000	100%	37,786,885,370	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, UPTD PKB	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program: (3), Persentase Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas		100%	2,859,680,530	100%	5,266,335,773	100%	19,268,000,000	100%	20,100,000,000	100%	20,100,000,000	100%	67,594,016,303	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, UPTD PKB	
X			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran	0	100%	1,289,705,165	100%	2,908,633,768	100%	6,788,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	26,986,338,933	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	

38			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	-	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	1,500,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	D	
39			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30	12	1,289,705,165	12	2,908,633,768	12	6,288,000,000	12	7,500,000,000	12	7,500,000,000	60	25,486,338,933	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	D
XI			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase dokumen inspeksi ,audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan		100%	200,500,000	100%	520,292,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	2,820,792,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	

40			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	A		
41			Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	B		
42			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		4	200,500,000	4	520,292,000	4	650,000,000	4	700,000,000	4	750,000,000	20	2,820,792,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	D
XII			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji	100%	77.74%	1,369,475,365	68.44%	1,837,410,005	100%	11,830,000,000	100%	11,400,000,000	100%	11,350,000,000	100%	37,786,885,370	UPTD PKB	

43			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	21081	17492	1,334,007,775	15879	1,814,136,005.00	24000	2,400,000,000	12302	2,450,000,000	12604	2,500,000,000	82277	10,498,143,780	UPTD PKB	D
44			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4	35,467,590	3	23,274,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	16	658,741,590	UPTD PKB	D
45			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						1	5,830,000,000	1	5,350,000,000	1	5,250,000,000	3	16,430,000,000	UPTD PKB	D
46			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1	1,750,000,000	1	1,750,000,000	1	1,750,000,000	3	5,250,000,000	UPTD PKB	D
47			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	UPTD PKB	D

48			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	9	450,000,000	UPTD PKB	D
49			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	6	3,000,000,000	UPTD PKB	D
50			Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi					1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000	UPTD PKB	D
51			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	36	600,000,000	UPTD PKB	D

Keterangan:

- A. Subkeg lama sebelum adanya pemutakhiran
- B. Subkeg hasil pemutakhiran jilid 1 (perencanaan tahun 2024)
- C. Subkeg hasil pemutakhiran jilid 2 (perencanaan tahun 2025-2026)
- D. Subkeg lama yang tidak berubah karena adanya pemutakhiran (perencanaan tahun 2021-2026)

Tabel 6.1 (Sebelum Pemutakhiran)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan, Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir pada akhir periode Renstra		Keterangan Sub Kegiatan
							2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	1,810,000,000	
					Persentase Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	100%	100%	11,383,075,400	100%	11,383,075,400	100%	11,383,075,400	100%	11,393,075,400	100%	11,403,075,400	100%	56,945,377,000	
					Persentase Administrasi Kepegawaian dan Umum	100%	100%	1,567,695,040	100%	1,778,000,000	100%	1,928,000,000	100%	1,928,000,000	100%	1,998,000,000	100%	9,199,695,040	
					Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	5,620,357,290	100%	5,859,466,600	100%	6,099,466,600	100%	6,129,466,600	100%	6,369,466,600	100%	30,078,223,690	
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	5,629,458,000	100%	5,629,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,849,458,000	100%	28,567,290,000	
I				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	1,810,000,000	Sekretariat
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	15	250,000,000	Sekretariat
2				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2	35,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	190,000,000	Sekretariat
3				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	2	35,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	190,000,000	Sekretariat
4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	200,000,000	4	230,000,000	4	180,000,000	4	190,000,000	4	200,000,000	20	1,000,000,000	Sekretariat
5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2	30,000,000			12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	38	180,000,000	Sekretariat

II				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	11,383,075,400	100%	11,383,075,400	100%	11,383,075,400	100%	11,393,075,400	100%	11,403,075,400	100%	56,945,377,000	Sekretariat	
6				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	80	11,059,422,400	80	11,059,422,400	70	10,908,075,400	75	10,918,075,400	80	10,928,075,400	80	54,873,071,000	Sekretariat	
7				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1	97,225,000	1	97,225,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	554,450,000	Sekretariat	
8				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	30,000,000	1	30,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	270,000,000	Sekretariat	
9				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Sekretariat
10				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1	21,428,000	1	21,428,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	147,856,000	Sekretariat	
11				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12	175,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	60	950,000,000	Sekretariat	
III				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	719,695,040	100%	850,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	4,569,695,040	Sekretariat	
12				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		2	250,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	14	1,650,000,000	Sekretariat	
13				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	450,000,000	Sekretariat	
14				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	50,000,000	1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	Sekretariat	
15				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	300	150,000,000	Sekretariat		
16				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50	169,695,040	50	200,000,000.00	50	200,000,000	50	200,000,000.00	50	200,000,000.00	250	969,695,040	Sekretariat	
17				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	200,000,000.00	12	200,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	60	1,150,000,000	Sekretariat	

IV				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	848,000,000	100%	928,000,000	100%	928,000,000	100%	928,000,000	100%	998,000,000	100%	4,630,000,000	Sekretariat
18				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000	25	105,000,000	Sekretariat
19				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	200	500,000,000	Sekretariat
20				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10	50,000,000	10	68,000,000	10	68,000,000	10	68,000,000	10	80,000,000	50	334,000,000	Sekretariat
21				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	78,000,000	4	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	80,000,000	14	368,000,000	Sekretariat
22				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15	280,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	75	1,280,000,000	Sekretariat
23				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10	105,000,000	Sekretariat
24				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	300,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	438,000,000	60	1,938,000,000	Sekretariat
V				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	5,140,357,290	100%	5,379,466,600	100%	5,599,466,600	100%	5,629,466,600	100%	5,869,466,600	100%	27,618,223,690	Sekretariat
25				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	5	510,000,000	Sekretariat
26				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	470,600,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,140,000,000	9	4,610,600,000	Sekretariat
27				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		12	4,069,757,290	10	3,429,466,600	10	3,349,466,600	10	3,549,466,600	10	3,549,466,600	52	17,947,623,690	Sekretariat
28				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		0	150,000,000	0	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	300,000,000	6	1,050,000,000	Sekretariat
29				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	-	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	700,000,000	Sekretariat
30				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terlaksana		1	350,000,000	1	200,000,000	1	350,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,300,000,000	Sekretariat
31				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	50,000,000	10	350,000,000	10	400,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	50	1,500,000,000	Sekretariat

VI				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	5,629,458,000	100%	5,629,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,729,458,000	100%	5,849,458,000	100%	28,567,290,000	Sekretariat
32				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	2,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	26,000,000	Sekretariat
33				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	5,320,000,000	12	5,316,000,000	12	5,416,000,000	12	5,416,000,000	12	5,493,458,000	60	26,961,458,000	Sekretariat
34				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	307,458,000	12	307,458,000	12	307,458,000	12	307,458,000	12	350,000,000	60	1,579,832,000	Sekretariat
VII				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	480,000,000	100%	480,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,460,000,000	Sekretariat
35				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		35	30,000,000.00	40	30,000,000	65	35,000,000	65	35,000,000	70	35,000,000	275	165,000,000	Sekretariat
36				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35	280,000,000	40	280,000,000	65	290,000,000	65	290,000,000	70	290,000,000	275	1,430,000,000	Sekretariat
37				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	20,000,000	10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	115,000,000	Sekretariat
38				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000	Sekretariat

B	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				33,850,000,000		51,810,000,000		57,468,000,000		55,600,000,000		62,700,000,000		261,428,000,000	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program : (1).Persentase Perengkapan Jalan Yang Memadai		100%	17,550,000,000	100%	21,600,000,000	100%	24,750,000,000	100%	23,150,000,000	100%	30,250,000,000	100%	117,300,000,000	Bidang Lalu lintas
VIII				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Persentase dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang tersedia		100%	500,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	3,600,000,000	Bidang Lalu lintas
39				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,500,000,000	Bidang Lalu lintas
40				Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4	700,000,000	Bidang Lalu lintas
41				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	0	1	100,000,000							1	100,000,000	Bidang Lalu lintas
42				Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Baru				1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	Bidang Lalu lintas	
IX				Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang tersedia		100%	9,700,000,000	100%	12,500,000,000	100%	15,100,000,000	100%	13,500,000,000	100%	20,500,000,000	100%	71,300,000,000	Bidang Lalu lintas
43				Pembangunan Prasarana Jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun		0	-	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	12	2,000,000,000	Bidang Lalu lintas
44				Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	4643	300	6,500,000,000	300	8,000,000,000	300	9,600,000,000	300	8,000,000,000	300	15,000,000,000	1500	47,100,000,000	Bidang Lalu lintas
45				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		60	3,200,000,000	60	4,000,000,000	60	5,000,000,000	60	5,000,000,000	60	5,000,000,000	300	22,200,000,000	Bidang Lalu lintas

X				Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa		100%	7,000,000,000	100%	7,650,000,000	100%	8,200,000,000	100%	8,250,000,000	100%	8,250,000,000	100%	39,350,000,000	Bidang Lalu lintas	
46				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota		12	1,300,000,000	12	1,500,000,000.00	12	1,950,000,000	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	60	10,750,000,000	Bidang Lalu lintas	
47				Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Baru					1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000	Bidang Lalu lintas	
48				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Baru					6	5,000,000,000.00	6	4,000,000,000	6	4,000,000,000	18	13,000,000,000	Bidang Lalu lintas	
49				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		3	500,000,000	3	650,000,000.00	3	750,000,000.00	3	750,000,000.00	3	750,000,000	15	3,400,000,000	Bidang Lalu lintas	
50				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan ,pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas		6	5,000,000,000	6	5,000,000,000.00							-	12	10,000,000,000	Bidang Lalu lintas
51				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		1	200,000,000	1	500,000,000								2	700,000,000	Bidang Lalu lintas

XI				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	Persentase dokumen ANDALALIN yang tersedia		100%	350,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	750,000,000	100%	3,050,000,000	Bidang Lalu lintas
52				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		6	100,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	30	700,000,000	Bidang Lalu lintas
53				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1	50,000,000	2	100,000,000							3	150,000,000	Bidang Lalu lintas
54				Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi					2	100,000,000	2	100,000,000	2	200,000,000	6	400,000,000	Bidang Lalu lintas	
55				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi					6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	18	600,000,000	Bidang Lalu lintas	
56				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi		6	200,000,000	6	200,000,000							12	400,000,000	Bidang Lalu lintas
57				Penetapan kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan		0		1	200,000,000							1	200,000,000	Bidang Lalu lintas
58				Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan					6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	18	600,000,000	Bidang Lalu lintas	

XIII				persentase layanan angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program: (2). Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang tersedia		93.75%	3,600,000,000	100%	12,150,000,000	100%	13,450,000,000	100%	12,350,000,000	100%	12,350,000,000	100%	53,900,000,000	
59					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek yang diawasi		100%	500,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	100%	5,550,000,000	Bidang Angkutan
60					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12	500,000,000	12	600,000,000	12	750,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	60	3,150,000,000	Bidang Angkutan
61					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4449	0	-	4489	500,000,000	4529	600,000,000	4569	650,000,000	4609	650,000,000	18196	2,400,000,000	Bidang Angkutan
XIV					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe c yang terkelola	2	2	3,100,000,000	3	10,250,000,000	3	11,250,000,000	3	10,250,000,000	3	10,250,000,000	3	45,100,000,000	Bidang Angkutan
62					Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,100,000,000	Bidang Angkutan
63					Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2	0	500,000,000	1	5,000,000,000							1	5,500,000,000	Bidang Angkutan
64					Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi						3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	9	9,000,000,000	Bidang Angkutan
65					Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang						1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	3	15,000,000,000	Bidang Angkutan
66					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan			500,000,000	1	3,000,000,000							1	3,500,000,000	Bidang Angkutan
67					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan terpelihara		1	2,000,000,000	2	2,000,000,000							2	4,000,000,000	Bidang Angkutan
68					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.						100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	300	450,000,000	Bidang Angkutan
69					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara						2	2,800,000,000	2	1,800,000,000	2	1,800,000,000	6	6,400,000,000	Bidang Angkutan
70					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0	-	100	150,000,000							100	150,000,000	Bidang Angkutan

XV				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek yang tersedia		0	0	1	500,000,000	1	550,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	2,050,000,000	Bidang Angkutan
71				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	800,000,000	Bidang Angkutan
72				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota		0	0	1	100,000,000	0	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	450,000,000	Bidang Angkutan
73				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	Bidang Angkutan
XVI				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin penyelenggaraan angkutan orang		0	0	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000	Bidang Angkutan
74				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	16	400,000,000	Bidang Angkutan
XVI				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase dokumen inspeksi ,audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan		0	0	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	800,000,000	Bidang Angkutan
75				Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Terminal		0	0	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	48	400,000,000	Bidang Angkutan
76				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		0	0	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	48	400,000,000	Bidang Angkutan

			Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator Program: (3). Persentase Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas		100%	12,700,000,000	100%	18,060,000,000	100%	19,268,000,000	100%	20,100,000,000	100%	20,100,000,000	100%	90,228,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan , UPTD PKB
XVII				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran	0	100%	5,200,000,000	100%	6,760,000,000	100%	6,788,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	34,748,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
77				Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	100,000,000	1	100,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	1,700,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
78				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30	12	5,100,000,000	12	6,660,000,000	12	6,288,000,000	12	7,500,000,000	12	7,500,000,000	60	33,048,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
XVIII				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase dokumen inspeksi ,audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan		100%	400,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	3,100,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
79				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	12	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	12	200,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
80				Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
81				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		4	200,000,000	4	600,000,000	4	650,000,000	4	700,000,000	4	750,000,000	20	2,900,000,000	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

XIX				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji	100%	100%	7,100,000,000	100%	10,700,000,000	100%	11,830,000,000	100%	11,400,000,000	100%	11,350,000,000	100%	52,380,000,000	UPTD PKB
82				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	21081	22500	2,000,000,000	23200	2,600,000,000.00	24000	2,400,000,000	12302	2,450,000,000	12604	2,500,000,000	94606	11,950,000,000	UPTD PKB
83				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3	100,000,000	3	100,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	800,000,000	UPTD PKB
84				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	1	5,830,000,000	1	5,350,000,000	1	5,250,000,000	5	26,430,000,000	UPTD PKB
85				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	0	1	1,500,000,000	1	1,750,000,000	1	1,750,000,000	1	1,750,000,000	4	6,750,000,000	UPTD PKB
86				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	UPTD PKB
87				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	0	0	-	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	9	450,000,000	UPTD PKB
88				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		0	0	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	8	4,000,000,000	UPTD PKB
89				Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi				1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	UPTD PKB
90				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	48	800,000,000	UPTD PKB

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur**

No	Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan												
1	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia		50.000.000.000		86.800.000.000		170.000.000.000		170.000.000.000		170.000.000.000	
1.1	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 pkt	10.000.000.000	1 pkt	26.300.000.000	1 pkt	50.000.000.000	1 pkt	50.000.000.000	1 pkt	50.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	1333	25.000.000.000	2500	45.500.000.000	5556	100.000.000.000	5556	100.000.000.000	5556	100.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	Pokir
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	Musrenbang
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1 pkt	5.000.000.000	1 pkt	5.000.000.000	1 pkt	5.000.000.000	1 pkt	5.000.000.000	1 pkt	5.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar

2	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa		25.000.000.000									
2.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan ,pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 pkt	25.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar								
3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek yang diawasi		4.000.000.000									
3.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
3.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
4	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia		20.000.000.000									

4.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
4.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2						Bantuan Provinsi Jabar
4.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar
5	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase titik parkir yang terawasi		20.000.000.000									
5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	
5.2	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar

6	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji		5.000.000.000									
6.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	Bantuan Provinsi Jabar

Berdasarkan data tabel 6.1 diatas terdapat perubahan target pada indikator kinerja sub-kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2025-2026. Perubahan target kinerja dilakukan atas dasar penyesuaian data jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir. Berdasarkan hasil dari evaluasi renstra dan renja tahun sebelumnya realisasi/capaian dari indikator kinerja sub-kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor jauh dari target yang telah ditetapkan.

Berikut Berita Acara dan data jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kendaraan tahun 2025-2026 :



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dr. Muwardi 395 Telp. (0263) 263424,261897 Fax. (0263) 284536
Cianjur 43215 Jawa Barat

BERITA ACARA

Nomor : 500.11.1/320/BA-PKB/II/2024

PEMBAHASAN
PERUBAHAN TARGET KINERJA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari Ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pukul 09.00 WIB, telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Perubahan Target Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Penyesuaian target jumlah kendaraan wajib uji menyesuaikan pembaruan data kendaraan;
2. Dampak langsung terhadap target kinerja;
3. Pemahaman bersama tentang urgensi pencapaian target kinerja agar tetap terpenuhi;

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyetujui perubahan target kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan pembaruan data yang tersedia pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- KEDUA : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran 1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan rapat Pembahasan Perubahan Target Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

H. DADAN GINANJAR, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197112041991011002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Dr. Muwardi 395
Cianjur 43215 Jawa Barat

Telp. (0263) 263424,261897

Fax. (0263) 284536

BERITA ACARA

Nomor : 500.11.1/320/BA-PKB/11/2024

PEMBAHASAN

PERUBAHAN TARGET KINERJA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul 09.00 WIB, telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Perubahan Target Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Penyesuaian target jumlah kendaraan wajib uji menyesuaikan pembaruan data kendaraan;
2. Dampak langsung terhadap target kinerja;
3. Pemahaman bersama tentang urgensi pencapaian target kinerja agar tetap terpenuhi;

MENYEPAKATI

- KESATU** • Menyepakati perubahan target kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan pembaruan data yang tersedia pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- KEDUA** • Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran 1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan rapat Pembahasan Perubahan Target Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- KETIGA** • Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711204 199101 1 002

TARGET KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN I.JJI TAHUN 2026

NO.	JENIS KENDARAAN	PROYEKSI TARGET KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI TAHUN 2025	TARGET KBWU	KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN TAHUN 2026 s/D RTJ[AN JANUARI
			2026	
1	2	9	4	4
1.	MOBIL BIS 1. Mobil Bis Kecil (1-12 pnp) 2. Mobil Bis Sedang (13-26 pnp) 3. iviobii bis besar(2 26 pnp)	1,187 128 132	1,278 156	
2.	MOBIL BARANG 1. Truck (JBB2 3500 Kg - 9500 Kg) 2. Truck (JBB 9500 Kg - 17500 Kg) 3. Truck (JUB 2 175UU Kg) 4. Pick Up (JBB S 3500 Kg) 5. Box/Bak Tertutup (JBB 3500 Kg) 6. Box/Bak Tertutup (JBB 2 3500 Kg- 9500 Kg) 7. Tanki (jBB 3500 Kg) 8. Tanki (JBB2 3500 Kg - 9500 Kg) 9. Tractor Head 10. Kereta Gandengan 11. Kereta Tempelan 12. Kereta Penarik	2,102 83 131 8,107 252 165 8 7 - -	2,171 86 137 8,162 275 179 9 7 -	
	KENDARAAN KHUSUS 1. Pemadam Kebakaran 2. Ambulance 3. Derek			
JUMLAH		12,302	12,604	

An.Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor



POPON MASITOH SH
NIP.196610041987022002

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

7.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan program Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 sebagai pelaksanaan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 pada Misi ke-3 dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan sebagaimana tabel dibawah

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra

No	Sasaran (IKU) / Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	okt (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I	Meningktanya Kualitas Kinerja Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	98,67%	98,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	77,14%	74,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Layanan Angkutan	35,71%	50,00%	46,22%	50,33%	53,68%	56,48%	58,85%	58,85%

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020		okt (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	73,33	73,33	75,24	77,14	79,05	81,90	83,81	83,81
2	Kinerja lalu lintaskabupaten/kota (skor)	0,47	0,47	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur 2021-2026 akan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur selama periode tersebut mengikuti periode berikutnya.

Dengan adanya rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran. Selain itu, dalam rangka menunjang pembangunan transportasi jalan dan penyebarluasan informasi di kabupaten Cianjur serta pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan sektor perhubungan mutlak perlu adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

Disamping itu guna mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur perlu pula didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur yang memadai. Program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan memang diarahkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu hendaknya mendapat dukungan untuk merealisasikannya. Demikian Rencana Strategis 2021-2026 disampaikan, kami berharap semoga dapat terwujud sehingga tujuan akhir dari setiap program dan sasaran dapat tercapai.

Cianjur, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



DAJANUS MANJAR, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711204 199101 1 002